

# Pengaruh Pengawasan Pajak Hotel Terhadap Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak (Studi Kasus Pada Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Garut)

Fajar Tri Sakti, Sanri Nabila Fauzia

Jurusan Administrasi Publik Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik  
Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati Bandung  
Email : [nftsakti@uinsgd.ac.id](mailto:nftsakti@uinsgd.ac.id), [nabilafauziasanri@gmail.com](mailto:nabilafauziasanri@gmail.com)

## Abstract

*Masih banyak terjadinya beberapa masalah dalam tingkat kepatuhan wajib pajak hotel yang belum efektif secara optimal di Kabupaten Garut. Pada tahun 2013-2017, Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang tidak mencapai target. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui seberapa besar pengaruh pengawasan pajak hotel terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak dengan studi kasus pada Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Garut. Peneliti menggunakan teori pengawasan dari Terry yang terdiri dari tiga dimensi yaitu: mengukur hasil pekerjaan, membandingkan hasil pekerjaan dengan standard dan memastikan perbedaan, dan mengoreksi penyimpangan yang tidak dikehendaki melalui tindakan perbaikan. Sedangkan untuk variabel tingkat kepatuhan wajib pajak peneliti menggunakan teori tingkat kepatuhan wajib pajak dari Siti Kurnia Rahayu yang terdiri dari dua dimensi yaitu: kepatuhan formal dan kepatuhan material. Berdasarkan analisis koefisien determinasi diperoleh angka R square sebesar 0,146 atau 14,6%. Hal ini menunjukkan bahwa persentase pengaruh variabel independen pengawasan (X) terhadap variabel dependen yaitu tingkat kepatuhan wajib pajak (Y) sebesar 14,6% sedangkan sisanya sebesar 85,4% dipengaruhi oleh variabel lain yang tidak diteliti oleh peneliti.*

**Kata Kunci:** Pengawasan; Pajak; Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak.

## A. PENDAHULUAN

Dalam era globalisasi ini peran administrasi publik semakin menentukan dalam berbagai hal, manakala ditinjau dari dimensi administrasi publik, maka pembangunan administrasi publik yang mampu untuk dapat menjamin percepatan, kelancaran, keserasian, keterpaduan tugas, dan fungsi penyelenggaraan pemerintah, pembangunan maupun kehidupan masyarakat. Dimensi lain dari pada administrasi publik adalah pengawasan. Pengawasan dilakukan agar mempertebal rasa tanggung jawab terhadap pejabat yang disertai tugas dan wewenang dalam melaksanakan pekerjaan, mendidik yang diawasainya agar mereka melaksanakan pekerjaan sesuai dengan prosedur yang telah ditentukan, untuk mencegah terjadinya penyimpangan, penyelewengan, kelalaian, dan kelemahan agar tidak terjadi kerugian yang tidak diinginkan.

Selain itu, manfaat dari pengawasan ialah relatif dan tergantung dari pentingnya kegiatan itu, sumbangan yang dibuat, serta besarnya organisasi.

Pengawasan adalah upaya atau ketetapan dalam menguji apapun sesuatu persetujuan, agar sesuatu dilaksanakan sesuai dengan peraturan yang telah ditetapkan dan intruksi yang telah ditetapkan dan prinsip perencanaan yang sudah tidak dapat dipungkiri lagi.

Pengawasan merupakan fungsi administrasi yang berfungsi untuk mencegah terjadinya penyimpangan-penyimpangan atau penyelewengan-penyelewengan dari rencana kebijakan yang telah dirumuskan sebelumnya. Dengan pengawasan akan ditemukan titik terang kekurangan atau kelebihan serta hambatan dalam pelaksanaan kebijakan. Pengawasan merupakan peran penting untuk mengukur pelaksanaan kerja atau kegiatan dalam sebuah organisasi. Pengawasan dapat membantu organisasi dalam melakukan penilaian apakah suatu pekerjaan dapat dijalankan secara efektif. Salah satu keterkaitan pengawasan adalah dengan tingkat kepatuhan wajib pajak.

Tingkat Kepatuhan wajib pajak dapat tercapai dengan baik apabila didukung oleh para pemimpin yang mengawasi kerjanya. Maka dari itu, dengan pengawasan merupakan hal yang sangat penting demi kelancaran pekerjaan yang dikerjakan. Tingkat kepatuhan wajib pajak merupakan fokus utama dari pengawasan disini. Karena, tingkat kepatuhan wajib pajak yang baik berdampak positif bagi pelaku pengawasan sehingga mereka dapat menyelesaikan pekerjaannya dengan baik. Dalam rangka pencapaian tingkat kepatuhan wajib pajak, maka setiap daerah harus secara kreatif mampu menciptakan dan mendorong semakin meningkatnya sumber-sumber pendapatan asli daerah melalui pengawasan. Salah satu sumber-sumber Pendapatan Asli Daerah yang potensial adalah dari sektor Pajak Hotel.

Kabupaten Garut merupakan salah satu kota di Indonesia dimana masih banyak terjadi beberapa masalah dalam tingkat kepatuhan wajib Pajak Hotel yang belum efektif secara optimal. Pajak Hotel sebagai salah satu sumber

Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang bersumber dari wajib pajak. Kabupaten Garut menjadi salah satu kota yang memiliki Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang cukup tinggi, yang mengalami peningkatan target dan realisasi disetiap dari tahun 2013-2016, namun tidak mencapai target pada tahun 2017. Terkadang selisih antara target dan realisasi setiap tahunnya menurun.

Selain dilihat dari permasalahan tersebut, masalah dalam tingkat kepatuhan wajib Pajak Hotel juga dapat dilihat dari denda dari Pajak Hotel yang ada disetiap tahunnya dari tahun 2013-2016 yang menunjukkan masih terdapatnya ketidak patuhan wajib pajak hotel. Masalah dalam tingkat kepatuhan wajib Pajak Hotel juga dapat dilihat antara penerimaan yang di dapat dari Pajak Hotel yang tidak sebesar Pajak lain yang dipungut sama besarnya yaitu 10%. Berdasarkan observasi awal peneliti menemukan bahwa tingkat kepatuhan wajib pajak belum optimal dilihat dari dimensi kepatuhan formal dan kepatuhan material.

## **B. TINJAUAN PUSTAKA**

### **Pengertian Administrasi**

Secara etimologis kata Administrasi , berasal dari bahasa Latin yan berasal dari *ad + ministrare* . *Ad* artinya intensif, *ministrare* artinya *to serve* (melayani) , membantu atau memenuhi . Jadi artinya melayani secara intensif . Kemudian terbentuk kata “*administration* ” (Pimpinan). Dilihat dari asal usul bahwa administrasi berasal dari bahasa Belanda, Pengertian *administratie* (administrasi dalam arti sempit ) kegiatan tata usaha. Walaupun dalam bahasa Belanda sebenarnya mengandung arti luas , namun bangsa kita tidak diberi kesempatan memegang jabatan adminstrasif , melainkan bersifat *clerical work* , sehingga timbulah istilah administrasi dalam arti TATA USAHA .

Dari bahasa Inggris administrasi , *Administrasion*, dengan asal kata *to administer* artinya *to serve* (melayani) , *to manage* (mengelola ) , atau *direct* (menggerakkan) , dengan demikian. Dalam arti luas berarti mengelola dan memberikan pelayanan.

Selanjutnya diuraikan beberapa definisi Administrasi dari beberapa ahli :

1. Administration may be defined as the organization and direction of human and material resources to achieve desired ends . (John F Pfiffner, 1960) .
2. (Administrasi dapat didefinisikan sebagai organisasi dan pengarahan sumber daya material dan sumber daya material dan sumber daya manusia untuk mencapai tujuan-tujuan yang diinginkan) .
3. Administration is conceived as the necessary activities of these individuals (executives) in an organization who are change with ordering . forwarding , and facilitating the associate efforts of group of individuals brought together to realize certain defined purpose (Ordway Tead , 1954)
4. (Administrasi adalah meliputi kegiatan- kegiatan individu (eksekutif ) yan penting dalam suatu organisasi yang merubah dengan teratur, memajukan , dan menyediakan fasilitas usaha kerja sama kelompok individu untuk merealisasikan tujuan yang ditentukan).
5. Administration as the activities of groups cooperating to accomplish common goals (H.A Simon ,et-al, 1958 :1).
6. (Administrasi sebagai kegiatan kerjasama kelompok untuk menyelesaikan tujuan bersama).
7. Administration is guidance , leadersip and control of the efforts of a group of individuals toward some common goal (William H Newman).
8. (Administrasi adalah Pembimbingan , kepemimpinan dan pengendalian usaha- usaha suatu kelompok individu kearah pencapaian tujuan bersama ) .
9. Administration has to do with getting things done , with the accomplishment of defined objectives (Luther Gulick).
10. (Administrasi bertalian dengan pelaksanaan kerja , dengan pencapaian tujuan-tujuan yang telah ditentukan ) .
11. Administration is a process common to all group efforts, public or private ,civil or military , large scale or small scale (Leonard D White) .

12. (Administrasi adalah suatu proses yang umum dalam semua usaha-usaha kelompok baik dalam usaha umum atau pribadi maupun sipil atau militer dengan secara besar- besaran ataupun kecil-kecilan).

Dengan demikian menurut Prof. Prajudi Atmsudirdjo ,bahwa administrasi dapat ditinjau dari sudut proses ,fungsional dan institusional :

1. Proses.

Segala kegiatan yang dilakukan untuk mencapai tujuan dimulai dari pada proses pemikiran , proses pelaksanaan sampai kepada proses tercapainya tujuan itu sendiri .

2. Fungsional.

Didalam segala kegiatan untuk mencapai tujuan yang telah dilakukan itu, terdapat berbagai fungsi atau tugas,, yaitu perencanaan, tugas mengorganisir , tugas menggerakkan , tugas mengawasi atau meneliti segala kegiatan agar supaya tidak terjadi penyimpangan .

3. Institusional (kepranataan / kelembagaan).

Administrasi sebagai totalitas kelembagaan dimana dalam lembaga itu terdapat kegiatan - kegiatan yang dilakukan untuk mencapai tujuan.

Ditinjau dari aspek kegiatan administrasi terdapat 4 macam :

1. *Administrator* (orang yang menetapkan);
2. Manajer (orang yang mengendalikan / memimpin usaha);
3. Staf ahli (membantu pemikiran untuk manajer);
4. *Worker* (orang yang langsung bekerja ).

Sedangkan dari ciri-ciri Administrasi dapat dilihat dari 3 (tiga ) aspek:

1. Sekelompok orang ;

Adanya orang-orang yang bekerja sama dalam wadah organisasi .

2. Adanya kerja sama ;

Dalam administrasi kerja sama merupakan bagian yang penting untuk mencapai tujuan bersama .

### 3. Tujuan

Tujuan merupakan harapan, sasaran , target , atau pencapaian akhir bersama yang telah ditentukan sebelumnya. Engkus (2017 :5)

### **Administrasi Perpajakan**

Dalam istilah bahasa Arab, pajak dikenal dengan nama Al-Usyr atau Al-Maks, atau bisa juga disebut Adh-Dharibah, yang artinya adalah pungutan yang ditarik dari rakyat oleh para penarik pajak. Sedangkan para pemungutnya disebut Shahibul Maks atau Al-Asysyar. Adapun menurut ahli bahasa, pajak adalah suatu pembayaran yang dilakukan kepada pemerintah untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran yang dilakukan dalam hal menyelenggaraan jasa-jasa untuk kepentingan umum.

Definisi lain dari pajak sendiri adalah peralihan kekayaan dari pihak rakyat kepada kas Negara untuk membiayai pengeluaran rutin dan surplusnya digunakan sebagai *public saving* yang merupakan sumber utama untuk pembiayaan *public investment*. Apabila dilihat dari sisi propektif ekonomi maka pajak adalah beralihnya sumber daya dari sector privat kepada sector public yang mengakibatkan berkurangnya kemampuan individu dalam kepentingan menguasai sumber daya dan bertambahnya kemampuan keuangan Negara dalam penyediaan barang dan jasa publik yang merupakan kebutuhan masyarakat.

Berdasarkan pengertian pajak di atas maka dapat diambil kesimpulan bahwa pajak mempunyai beberapa ciri-ciri utama yaitu pajak dipungut dan diatur oleh undang-undang sebagai pedoman pelaksanaannya, pajak tidak menghasilkan kontraprestasi (imbalan) langsung bagi individu yang membayarkannya, pajak dipungut oleh pemerintah daerah dan pemerintah pusat, pajak digunakan untuk pembiayaan-pembiayaan pengeluaran pemerintah dalam melaksanakan kegiatannya dan apabila ada surplus digunakan sebagai *public investment*.

## 1. Ciri-ciri Pajak Daerah

- a. Dipungut oleh Pemda, berdasarkan kekuatan peraturan perundang-undangan.
- b. Dipungut apabila ada suatu keadaan, peristiwa dan perbuatan yang menurut peraturan perundang-undangan dapat dikenakan pajak daerah.
- c. Dapat dipaksakan, yakni apabila wajib pajak tidak memenuhi kewajiban pembayaran pajak daerah, yang bersangkutan dapat dikenakan sanksi (pidana dan denda).
- d. Tidak terdapat hubungan langsung antara pembayaran pajak daerah dengan imbalan/balas jasa secara perseorangan.
- e. Hasil penerimaan pajak daerah disetor ke kas daerah.

## 2. Pajak Hotel

Menurut Samudra (2016:167) Hotel adalah suatu bentuk usaha yang menggunakan suatu bangunan atau sebagian daripadanya yang khusus disediakan, dimana setiap orang dapat menginap dan makan serta memperoleh pelayanan dan fasilitas-fasilitas lainnya dengan pembayaran. Termasuk dalam pengertian hotel adalah: gubug pariwisata (*Cottage*), motel, losmen (rumah penginapan), wisma pariwisata, pesanggrahan (Hostel), penginapan remaja (Youth Hostel), pondok pariwisata (Home stay), rumah makan/restoran.

Penyelenggara hotel adalah perorangan atau badan yang menyelenggarakan usaha hotel untuk dan atas namanya sendiri atau untuk dan atas nama pihak lain yang menjadi tanggungannya.

Surat Pemberitahuan Pajak Daerah, yang selanjutnya disingkat SPTPD, adalah surat yang oleh wajib pajak untuk melaporkan perhitungan dan/atau pembayaran pajak objek pajak dan/atau harta dan kewajiban menurut ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.

## 1) Pengawasan

Pengawasan merupakan peran penting untuk mengukur pelaksanaan kerja atau kegiatan dalam sebuah organisasi. Pengawasan dapat membantu organisasi dalam melakukan penilaian apakah suatu pekerjaan dapat dijalankan secara efektif. Pengawasan merupakan fungsi administrasi yang berfungsi untuk mencegah terjadinya penyimpangan-penyimpangan atau penyelewengan-penyelewengan dari rencana kebijakan yang telah dirumuskan sebelumnya. Dengan pengawasan akan ditemukan titik terang kekurangan atau kelebihan serta hambatan dalam pelaksanaan kebijakan.

Urwick dalam Syafiie (2006:82) juga menganggap bahwa: “pengawasan adalah upaya agar sesuatu dilaksanakan sesuai dengan peraturan yang telah ditetapkan dan intruksi yang telah ditetapkan”.

Menurut Terry dalam Winardi (2012: 397) pengawasan terdiri daripada suatu proses yang dibentuk oleh tiga macam langkah-langkah yang bersifat universal yakni:

### 1. Mengukur hasil pekerjaan

Pengukuran merupakan tindakan memastikan jumlah atau kapasitas sesuatu entitas yang digariskan dengan baik. Pengukuran memerlukan sesuatu unit pengukuran dan penghitungan tentang beberapa kali unit tersebut mencakup oleh jumlah entitas yang sedang dipersoalkan. Pada umumnya entitas yang sedang diukur dapat diklasifikasi kedalam dua buah kelompok yakni:

- 1) Yang berhubungan dengan pelaksanaan sebuah program lengkap atau pelaksanaan suara total.
- 2) Yang mempersoalkan output per unit tenaga kerja langsung yang dipergunakan.

2. Membandingkan hasil pekerjaan dengan standard dan memastikan perbedaan.

Langkah nomer dua proses pengawasan terdiri dari tindakan: membandingkan hasil pekerjaan dengan standard. Hal tersebut pada dasarnya berarti mengevaluasi hasil pekerjaan. Apabila terdapat perbedaan antara hasil, pekerjaan dan standard maka seringkali diperlukan penilaian guna mengetahui pentingnya perbedaan tersebut. Maka oleh karenanya, menejer yang melaksanakan pekerjaan pengawasan harus menganalisa, mengevaluasi, dan menilai hasil-hasil sebaik mungkin. Begitu pula mencari saran-saran daripada pihak yang melaksanakan pekerjaan atau mereka yang dekat dengannya guna memperoleh petunjuk-petunjuk tentang usaha-usaha pengawasan apa harus dilakukan bersifat penting. Dalam hal membandingkan hasil pekerjaan dengan dasar pengawasan maka soal kekecualian yang perlu mendapatkan perhatian menejerial.

3. Mengoreksi penyimpangan yang tidak dikehendaki melalui tindakan perbaikan.

Hal tersebut merupakan langkah ketiga dan terakhir daripada proses pengawasan. Ia dapat dianggap sebagai tindakan memaksa agar operasi-operasi disesuaikan atau dilakukannya usaha-usaha untuk mencapai hasil yang sesuai dengan apa yang diharapkan. Apabila diketemukan penyimpangan-penyimpangan penting maka tindakan-tindakan cepat dan efektif merupakan suatu keharusan. Pengawasan efektif tidak dapat mentolelir keterlambatan-keterlambatan yang tidak perlu, dalih-dalih, kompromis-kompromis tanpa akhirnya atau kekecualian-kekecualian secara berlebihan. Tindakan koreksi dilaksanakan oleh pihak yang memilik kekuasaan atas hasil pekerjaan aktual. Agar dapat dicapai efektifitas maksimal, maka tindakan mengoreksi penyimpangan harus diikuti dengan tanggung jawab tetap dan tanggung jawab individual. Menyerahkan tanggung jawab sepenuhnya kepada seorang individu atas pekerjaannya merupakan salah satu alat terbaik untuk mencapai hasil sesuai

dengan harapan. Tindakan remedial lebih baik dibandingkan dengan tindakan korektif. Kausa sebenarnya yang menyebabkan timbulnya kesulitan harus ditemukan dan kemudahan hal tersebut perlu segera dikoreksi.

## 2) Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak

Menurut Kamus Umum Bahasa Indonesia dalam Siti Kurnia Rahayu (2013:138), kepatuhan didefinisikan sebagai berikut : Istilah kepatuhan berarti tunduk atau patuh pada ajaran atau aturan. Dalam perpajakan kita dapat memberi pengertian bahwa Kepatuhan Perpajakan merupakan ketaatan, tunduk dan patuh serta melaksanakan ketentuan perpajakan.

Sedangkan Kepatuhan Wajib Pajak dikemukakan oleh Norman D. Nowak yang dikutip oleh Moh. Zain (2004) dalam Siti Kurnia Rahayu (2013:138) adalah sebagai berikut: Suatu iklim kepatuhan dan kesadaran pemenuhan kewajiban perpajakan, tercermin dalam situasi dimana : - Wajib Pajak paham atau berusaha untuk memahami semua ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan, - Mengisi formulir pajak dengan lengkap dan jelas, - Menghitung jumlah pajak yang terutang dengan benar, - Membayar pajak yang terutang tepat pada waktunya.

Menurut Rahayu (2013:138) ada dua macam kepatuhan wajib pajak, yaitu kepatuhan formal dan kepatuhan material.

### 1. Kepatuhan Formal

Kepatuhan formal adalah suatu keadaan dimana Wajib Pajak memenuhi kewajiban secara formal sesuai dengan ketentuan dalam undang-undang perpajakan.

Indicator Kepatuhan Formal yaitu:

- a. Kepatuhan dalam mendaftarkan diri.
- b. Kepatuhan dalam menyetorkan kembali surat pemberitahuan.

## 2. Kepatuhan Material

Kepatuhan material adalah suatu keadaan dimana Wajib Pajak secara substantive atau hakekatnya memenuhi semua ketentuan material perpajakan, yakni sesuai isi dan jiwa undang-undang perpajakan. Kepatuhan material dapat juga meliputi kepatuhan formal.

Indicator Kepatuhan Material yaitu:

- a. Wajib pajak mengisi dengan lengkap dan benar.
- b. Menyampaikan Surat Pemberitahuan sebelum batas waktu berakhir.

## D. HASIL DAN PEMBAHASAN

Variabel pengawasan berdasarkan akumulasi responden, berada pada kategori tinggi. Dari hal tersebut dapat disimpulkan bahwa indikator-indikator sudah terlaksana dengan baik, artinya bahwa menurut responden pelaksanaan pengawasan Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Garut pada pajak hotel Kabupaten Garut sudah berjalan dengan baik berdasarkan variabel pengawasan. Hal ini dapat dilihat dari tingkat mengukur hasil pekerjaan yang berada pada kategori tinggi, tingkat membandingkan hasil pekerjaan dengan standard dan memastikan perbedaan yang berada pada kategori tinggi, dan juga tingkat mengoreksi penyimpangan yang tidak dikehendaki melalui tindakan perbaikan yang berada pada kategori tinggi. Hanya saja terdapat satu indikator yang masih belum optimal, yaitu pada indikator bidang pengawasan tidak mentolelir apabila ada keterlambatan dalam membayar pajak hotel. Dari hasil wawancara dengan responden bahwa bidang pengawasan masih mentolelir apabila ada keterlambatan dalam membayar pajak hotel. Responden mengatakan bahwa ia bisa saja tidak membayar pajaknya satu bulan sekali melainkan satu tahun sekali dan ia membayar dendanya.

Berdasarkan hasil perhitungan indikator-indikator pada dimensi tingkat kepatuhan wajib pajak berada pada kategori tinggi. Dari hal tersebut dapat

disimpulkan bahwa indikator-indikator sudah terlaksana dengan baik, artinya bahwa menurut responden pelaksanaan pengawasan Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Garut pada pajak hotel Kabupaten Garut sudah berjalan dengan baik berdasarkan dimensi tingkat kepatuhan wajib pajak. Hanya saja terdapat satu indikator yang masih belum optimal, yaitu pada indikator wajib pajak menyampaikan surat pemberitahuan (SPT) ke BAPENDA sebelum batas waktu berakhir dalam dimensi kepatuhan material. Dan skor kepatuhan material yang kurang dari skor kepatuhan formal. Dari hasil wawancara dengan responden bahwa memang ia kadangkali menyampaikan SPT setelah batas waktu berakhir, bisa satu minggu, bahkan satu tahun dan membayar denda.

**Tabel 1. Analisis koefisien determinasi**

**Model Summary**

Model	R	R Square	Adjusted Square	Std. Error of the Estimate
1	,382 <sup>a</sup>	,146	,126	2,74963

a. Predictors: (Constant), Pengawasan

Sumber: Hasil Penelitian (Diolah Peneliti) 2018

Dari tabel 1 di atas diperoleh angka R square sebesar 0,146 atau 14,6%. Hal ini menunjukkan bahwa persentase pengaruh variabel independen pengawasan (X) terhadap variabel dependen yaitu tingkat kepatuhan wajib pajak (Y) sebesar 14,6% sedangkan sisanya sebesar 85,4% dipengaruhi oleh variabel lain yang tidak diteliti oleh peneliti.

## **E. KESIMPULAN**

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah dilakukan oleh peneliti tentang Pengaruh Pengawasan terhadap Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak (Studi Kasus Pada Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Garut) maka diperoleh beberapa kesimpulan sebagai berikut: (1) Pengawasan Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Garut pada pajak hotel Kabupaten Garut sudah berjalan dengan baik berdasarkan variabel pengawasan. Hal ini dapat dilihat dari tingkat

mengukur hasil pekerjaan yang berada pada kategori tinggi, tingkat membandingkan hasil pekerjaan dengan standard dan memastikan perbedaan yang berada pada kategori tinggi, dan juga tingkat mengoreksi penyimpangan yang tidak dikehendaki melalui tindakan perbaikan yang berada pada kategori tinggi. Hanya saja terdapat satu indikator dalam dimensi mengoreksi penyimpangan yang tidak dikehendaki melalui tindakan perbaikan yang masih belum optimal, yaitu pada indikator bidang pengawasan tidak mentolelir apabila ada keterlambatan dalam membayar pajak hotel. (2) Tingkat kepatuhan wajib pajak sudah berjalan dengan baik berdasarkan variabel tingkat kepatuhan wajib pajak. Hal ini dapat dilihat dari tingkat kepatuhan formal dan tingkat kepatuhan material yang berada pada kategori tinggi. Hanya saja terdapat satu indikator yang masih belum optimal, yaitu pada indikator wajib pajak menyampaikan surat pemberitahuan (SPT) ke BAPENDA sebelum batas waktu berakhir dalam dimensi kepatuhan material. (3) Dari hasil analisis koefisien determinasi diperoleh angka R square sebesar 0,146 atau 14,6%. Hal ini menunjukkan bahwa persentase pengaruh variabel independen pengawasan (X) terhadap variabel dependen yaitu tingkat kepatuhan wajib pajak (Y) sebesar 14,6% sedangkan sisanya sebesar 85,4% dipengaruhi oleh variabel lain yang tidak diteliti oleh peneliti.

**DAFTAR PUSTAKA**

- Engkus. (2017). *Administrasi Kepegawaian Indonesia Pada Sektor Publik*. Bandung: FISIP UNPAS PRESS
- Fidel. (2010). *Cara Mudah & Praktis Memahami Masalah-Masalah Perpajakan*. Jakarta: Murni Kencana
- Mardiasmo. (2016). *Perpajakan*. Yogyakarta: Andi Offset
- Rahayu. Siti Kurnia. (2013). *Perpajakan Indonesia Konsep & Aspek Formal*. Yogyakarta: Graha Ilmu
- Samudra, Azhari Aziz. (2016). *Perpajakan di Indonesia: Keuangan, Pajak, dan Retribusi Daerah*. Jakarta: Rajawali Pers
- Simanjuntak, Timbul Hamonangan. (2012). *Dimensi Ekonomi Perpajakan Dalam Pembangunan Ekonomi*. Jakarta: Raih Asa Sukses
- Sugiyono. (2012). *Metode Penelitian Administrasi*. Bandung: Alfabeta.
- Sugiyono. (2013). *Metode Penelitian Bisnis*. Bandung: Alfabeta.
- Sugiyono (2016). *Metode Penelitian & Pengembangan*. Bandung: Alfabeta.
- Sumiati, Imas. (2015). *Statistik*.
- Silalahi, Ulbert. (2013). *Studi tentang Ilmu Administrasi*. Bandung: Sinar Baru Algemindo
- Syafiie, Inu Kencana. (2010). *Ilmu Administrasi Publik*. Jakarta: Rineka Cipta
- Winardi. (2012). *Asas - Asas Manajemen*. Bandung: Alumni

**Jurnal:**

- Engkus.(2017) "Implementasi Undang-undang Perdagangan : Implikasinya Dalam Kebijakan Pengendalian Harga Kebutuhan Pokok Masyarakat"dalam Jurnal LITIGASI 18 (1). pp. 1-144. Bandung: UNPAS Bandung.
- Engkus.(2017) "Budaya Panengen Sebagai Representasi Simbolik Kepemimpinan Desa Cikalong" dalam Jurnal Ilmiah seni dan budaya Panggung Vol.27 No.2 Juni 2017.Bandung:ISBI Bandung.
- Engkus. (2017). "Perilaku Narsis Pada Media Sosial Di Kalangan Remaja Pelajar dan Upaya Penanggulangannya di Wilayah Bandung Timur".Dalam Jurnal Penelitian Komunikasi Vol 20 No 2 Desember 2017:Bandung: BPPKB Bandung.